

GUBERNUR SERAHKAN 222 SERAT PALILAH

Tanah Kasultanan Tak Dapat Diperjualbelikan

SLEMAN (KR) - Gubernur DIY yang juga Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, tanah Kasultanan tidak dapat diperjualbelikan. Akan tetapi, masyarakat dipersilakan mempergunakan tanah Kasultanan tersebut asalkan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan budaya.

Penegasan Sultan tersebut disampaikan saat menyerahkan sebanyak 222 *serat palilah* kepada warga Padukuhan Tunggularum Kalurahan Wonokerto Turi di Gedung Serbaguna Tunggularum, Selasa (12/2). Hadir pula GKR Mangkubumi selaku Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Datu Dana Suyasa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Bupati Sleman Kustini dan Wabup Danang Maharsa.

Pada kesempatan itu, Sultan menyampaikan ucapan selamatnya kepada warga Padukuhan Tunggularum yang telah menerima

serat palilah atas penggunaan tanah Kasultanan. "Penyerahan *serat palilah* ini memberi kepastian bagi warga yang mempergunakan, begitu juga bagi Kasultanan yang memberikan izin pemanfaatan tanah Kasultanan," ujarnya.

Sedang menurut GKR Mangkubumi, penyerahan *serat palilah* ini dalam rangka tertib administrasi bagi penggunaan tanah Kasultanan. "Sehubungan sejak dihidupi, belum memiliki izin penggunaan tanah Kasultanan. Dalam rangka tertib

administrasi, Kasultanan memberikan izin penggunaan tanah berupa *serat palilah* sebanyak 222 *serat*," jelasnya.

Dikatakan pula, *serat palilah* merupakan surat keputusan tentang pemberian izin pemanfaatan tanah Kasultanan atau Kadipaten untuk sementara waktu sebelum diterbitkannya Serat Kekancangan. Dalam penyelesaian izin penggunaan tanah Kasultanan ini, jajaran KHP Datu Dana Suyasa melakukan sistem jemput bola sekaligus memulai layanan online yang

dikembangkan secara mandiri. Melalui langkah tersebut, permohonan sebanyak 222 bidang di atas tanah kasultanan seluas 75.450m² di Padukuhan Tunggularum dapat diselesaikan.

Selain menyerahkan 222 *serat palilah* untuk pemukiman dan fasilitas umum, Gubernur juga menyerahkan *serat palilah* kepada Pemkab Sleman untuk pengembangan RSUD Sleman yang diterima Wakil Bupati Danang Maharsa. Atas penyerahan *serat palilah* ini, Bupati Kustini menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Menurutnya, *serat palilah* ini menjadi dasar hukum bagi masyarakat dan Pemkab Sleman untuk memanfaatkan aset tanah Sultan Ground sebagai



KR-Istimewa

Warga Tunggularum Turi sumringah saat menerima serat palilah tanah kasultanan yang diserahkan Gubernur Sri Sultan HB X.

mana peraturan perundangan yang berlaku. "Dengan pemberian *serat palilah* ini

pula menjadikan kami beserta masyarakat akan lebih bertanggungjawab se-

bagai pihak yang memanfaatkan Sultan Ground," kata Bupati. (Has)-f

PASTIKAN STOK LPG 3 KG AMAN

Pertamina dan Pemda DIY Sidak Pangkalan

YOGYA (KR) - Untuk memastikan stok LPG 3 Kg dalam kondisi aman dan disalurkan secara tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga bersama Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) secara intens melakukan rapat koordinasi pada Senin (10/2). Selain itu, Pertamina Patra Niaga dan Pemda DIY melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pangkalan di wilayah DIY, khususnya di Kabupaten Sleman pada Selasa (11/2).

Ada 4 pangkalan LPG 3 Kg yang menjadi fokus inspeksi, di antaranya yang berada di Desa Kacor, Desa Sukoharjo, dan Desa Donoharjo. Sementara sejumlah pejabat yang terlibat di antaranya Kepala Disperindag DIY Yuna Pancawati, Biro Perekonomian DIY Yulia Hermawati, Sekretaris Hiswana Migas DIY Yulia Hermawati dan Sales Area Manager Retail Yogyakarta Pertamina Patra Niaga Weddy Surya Windrawan,

Kepala Disperindag DIY Yuna Pancawati mengatakan pemerintah bersama Pertamina terus berkoordinasi



KR-Istimewa

Sidak LPG 3 Kg Pemda DIY dan Pertamina Patra Niaga di beberapa pangkalan di Sleman.

nasidari melakukan monitoring penyaluran LPG 3 Kg kepada masyarakat, khususnya di titik pangkalan resmi. Selain stok, pihaknya pun ingin memastikan penyalurannya tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur serta ketentuan subsidi LPG yang telah ditetapkan. Baik untuk konsumen langsung maupun sub pangkalan atau pengecer.

"Kami menemukan stok tabung LPG di beberapa pangkalan yang dikunjungi dalam keadaan aman dan dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp 18.000. Apabila terdapat pangkalan yang beroperasi tidak sesuai dengan prosedur, misalnya menjual di atas HET, tentu-

nya dari Pertamina tidak segan untuk memberikan sanksi dan pembinaan," tutur Yuna.

Secara terpisah, Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan mengatakan terdapat banyak pangkalan LPG 3 Kg yang beroperasi di wilayah DIY.

"Setidaknya 7.809 pangkalan LPG 3 Kg tersebar di setiap desa di kota dan kabupaten DIY. Jumlahnya cukup banyak dan merata di tengah pemukiman warga," ujarnya.

Taufiq menambahkan Pertamina telah mengembangkan sistem informasi

untuk melacak keberadaan pangkalan LPG terdekat dari lokasi masyarakat yang bisa diakses melalui smartphone.

"Caranya sangat mudah, masyarakat bisa mengaksesnya di website dengan laman ptm.id/infolpg3kg kemudian klik lokasi pangkalan LPG 3 Kg, setelah itu akan langsung diarahkan dengan beberapa opsi lokasi pangkalan LPG 3 Kg terdekat melalui Google Maps," terangnya.

Taufiq juga mengungkapkan Pertamina telah melakukan penambahan fakultatif pasokan LPG 3 Kg di wilayah DIY. Setidaknya terdapat 95.400 tabung LPG 3 Kg tambahan fakultatif yang disalurkan sejak 5 hingga 11 Februari 2025 di 5 kota dan kabupaten di DIY.

Hal itu, tentu setelah berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah setempat. "Kami bersamasama dengan Pemda setempat saling berkoordinasi untuk memberikan rasa aman terhadap kebutuhan tabung LPG masyarakat. Untuk itu kami imbuhi kepada masyarakat tidak perlu khawatir hingga melakukan panic buying," pungkash Taufiq. (Ira)-f

HARI INI DIGELAR PWI SLEMAN

Donor Darah Berhadiah Sepeda Listrik

SLEMAN (KR) - Persewaan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sleman. Rabu (12/2) hari ini menggelar aksi sosial donor darah. Kegiatan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2025 ini bertujuan membantu sesama dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya donor darah.

Ketua PWI Sleman Wisnu Wardana mengatakan, bakti sosial donor darah dilaksanakan kerja sama Pemkab Sleman dan Palang Merah Indonesia (PMI) Sleman dengan target peserta 125 pendonor. "Donor darah berlokasi di Aula Bappeda Kabupaten Sleman mulai pukul 9.00-12.00," ujarnya, Selasa (11/2).

Menurut Wisnu, donor darah merupakan agenda rutin setiap tahun yang digelar PWI Sleman terutama dalam rangka memperingati HPN. Namun, PWI Sleman telah bertekad agar bakti sosial ini jumlah pesertanya agar terus bertambah dalam setiap tahunnya.

"Untuk menarik minat masyarakat ikut donor darah, pada HPN 2025 ini PWI Sleman telah menye-



KR-Istimewa

Penyerahan doorprize untuk donor darah PWI Sleman.

diadakan doorprize utama satu sepeda listrik serta beberapa hadiah peralatan elektronik lainnya. Diharapkan, dengan hadiah utama sepeda listrik, masyarakat yang ikut donor darah menjadi lebih banyak. Tahun 2024 kita dapat menjaring 104 pendonor yang lolos untuk diambil darahnya. Tahun ini (HPN 2025) kita targetkan 125 pendonor yang lolos," jelas Wisnu.

Ketua HPN 2025 Awan Turseno menambahkan, selain donor darah, pada peringatan HPN tahun 2025 juga akan menyelenggarakan beberapa kegiatan lain. Yakni bakti

sosial pembagian sembako bagi pedagang pasar yang tidak mampu, senam massal dan jalan sehat.

Pembagian sembako kerja sama Baznas Kabupaten Sleman sebanyak 150 paket, secara simbolis akan diserahkan pada Minggu, (16/2) di Lapangan Pemda Sleman bersamaan dengan acara senam massal dan jalan sehat. "Sesuai tema HPN 2025 yaitu iPers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa, maka kita akan berikan bantuan berupa sembako untuk 150 orang penerima manfaat," ujarnya. (Yud)-f



DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

KOMISI C DPRD KABUPATEN SLEMAN

Sebelum Masuk TPST Sendangsari, Sampah Harus Kering



KR-Istimewa

Untung Basuki Rahmat SAg

SLEMAN (KR) - Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Sendangsari, Minggu telah beroperasi untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Sleman. Namun ternyata operasinya TPST Sendangsari masih memunculkan persoalan di lingkungan sekitar yakni bau tak sedap dari sampah.

Komis C DPRD Sleman mendorong kepada eksekutif untuk segera mengambil langkah mengatasi bau tak

sedap dari sampah. Salah satunya perlu ada penerangan sampah sebelum dibawa ke ke TPST Sendangsari. Selain itu juga perlu melibatkan tim ahli dan teknologi untuk mengatasi bau sampah.

Sekretaris Komisi C DPRD Sleman Untung Basuki Rahmat SAg mengatakan, keberadaan TPST Sendangsari memang masih menjadi PR bagi pemerintah daerah karena masih ada komplain atau keluhan dari masyarakat mengenai bau sampah. Dimana bau sampah yang timbul di TPST Sendangsari karena sampah yang dibawa ke TPST Sendangsari masih basah dan kering.

"Ketika masih ada sampah yang basah, otomatis akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Padahal sampah yang di bawa ke sana (TPST Sendangsari), masih tercampur dengan sampah basah," kata Un-

tung, Selasa (11/2).

Untuk itu pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang cepat supaya keluhan masyarakat teratasi dengan baik. Salah satunya perlu ada pengelolaan sampah sebelum dibawa ke TPST Sendangsari. "Misalnya ada jemuran atau pengeringan sampah sebelum dibawa ke TPST Sendangsari. Tapi lokasi jemuran dan pengeringan harus yang jauh dari pemukiman," kata

Ketua DPC PPP Kabupaten Sleman ini.

Jika tidak, lanjut Untung atau yang kerap disapa UBR ini, pengeringan juga dapat dilakukan di depo-depo. Pengeringan itu dapat menggunakan teknologi. "Artinya pengeringan itu bisa menggunakan matahari atau alat. Dan itu bisa dilakukan di tiap-tiap depo. Supaya tidak ada lagi sampah basah yang diangkut ke TPST Sendangsari," ujar tokoh masyarakat

kat dari Ngijon Moyudan ini.

Dalam penggunaan alat untuk mengatasi sampah, eksekutif juga dapat menggandeng atau melibatkan tenaga ahli. Dengan harapan pengelolaan sampah secara maksimal. "Melibatkan tenaga ahli juga perlu. Supaya pengelolaan sampah di Sleman bisa lebih baik," terangnya.

Untuk ideal dalam mengatasi sampah, setidaknya ada 7-8 TPST di wila-

yah Kabupaten Sleman. Sementara saat ini baru 2 yakni Tamanmartani Kalasan dan Sendangsari Minggu. Kemudian dalam waktu dekat di TPST Donokerto, Turi. "Masih dibutuhkan anggaran Rp 100 miliar untuk mengatasi sampah, mulai bangun TPST hingga peralatan. Tentu itu dibutuhkan komitmen dan keseriusan dari eksekutif untuk menuntaskan masalah sampah ini," tegas Untung.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi C DPRD Sleman Indra Bangsawan SE. Menurutnya, bau tak sedap itu sudah terasa jauh dari lokasi TPST. Pengelola TPST sudah mencoba menggunakan cairan kimia disemprotkan ke seluruh area TPST untuk menghilangkan bau tak sedap. "Namun ternyata hasilnya belum maksimal. Kami berharap segera ada solusi," kata politisi muda dari Partai Golkar.



KR-Istimewa

Indra Bangsawan SE

Tokoh asal Kapanewon Turi berkomitmen mengawal anggaran kebutuhan TPST sebagai solusi penghilang bau tak sedap. Pemerintah daerah diminta segera menggandeng tim ahli, misalnya dari kalangan akademisi, atau pemerintah daerah lain yang memiliki alat atau teknologi peredam bau sampah. "Soal anggarannya ya mau nggak mau harus siap. Ya harus disiapkan anggarannya," tandasnya. (Sni)-d



KR-Istimewa

Komis C saat meninjau lokasi TPST Sendangsari.